

**LAPORAN KINERJA
BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Tahun 2021 yang merupakan Laporan Kinerja periode tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022.

Laporan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021. Selain itu laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPBJ kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap awal tahun berjalan merupakan acuan dan komitmen pimpinan BPPBJ Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja secara maksimal. Pencapaian target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021 masih dihadapkan oleh berbagai hambatan dan tantangan, terlebih pandemi Covid-19 masih belum usai, sehingga diperlukan berbagai penyesuaian dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Namun demikian, BPPBJ berhasil menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut dengan menerapkan nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta, yaitu berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan, sehingga target yang diperjanjikan tercapai dengan baik.

Kami berharap LKIP Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini dapat bermanfaat khususnya untuk BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang terjadi dimasa akan datang, serta dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Januari 2021
Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta



[Signature]
Sigit Wijatmoko
NIP. 197408301993111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada perangkat daerah dan menjadi salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Di samping itu, Laporan Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 juga bertujuan sebagai :

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 agar dapat digunakan untuk memberikan saran/ masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategis BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 22 Indikator Kinerja yang mengukur keberhasilan dari 10 Sasaran Strategis, 6 Sasaran Khusus dan 3 Sasaran Operasional, dengan ringkasan sebagai berikut.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN STRATEGIS					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	100%
2	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	4	4	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	95.29%	100%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	100%	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (43)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%
11	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus					
12	Terwujudnya layanan Barang dan Jasa melalui Ekatalog yang berkualitas bagi pemangku kepentingan (stakeholder)	Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	A (89,81)	100%
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	92	95,46	104%
17	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai rencana pengadaan	Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan	100%	100%	100%
Sasaran Operasional					
18	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

(Sumber data : pegawai.go.id)

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021, seluruh indikator kinerja telah mencapai target. Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 Program dan optimalisasi anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, meskipun anggaran yang dialokasikan mengalami refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi sebesar Rp 77.749.556.404 dan terealisasi sebesar Rp. 75.635.735.696 atau 97,28% persen. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2021 adalah sebesar 2,72%.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja

kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di masa mendatang.

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Permasalahan Umum	6
G. Sarana dan Prasarana	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Visi dan Misi BPPBJ	9
C. Penetapan Kinerja	10
D. Tujuan Yang Akan Dicapai BPPBJ	13
E. Sasaran Yang Ingin Dicapai	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja BPPBJ	16
B. Realisasi Anggaran	35
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, BPPBJ dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPPBJ dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tugas Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam fungsi- fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan;
5. Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
6. Pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
7. Pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

9. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Pengadaan, terdiri atas :
 1. Subbidang Pengelolaan Strategi Pengadaan; dan
 2. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan.
- d. Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Informasi Pengadaan.
- e. Bidang Advokasi dan Pembinaan Pengadaan, terdiri atas :
 1. Subbidang Advokasi Pengadaan;
 2. Subbidang Pendampingan Pengadaan; dan
 3. Subbidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan.
- f. UPPBJ;
 - a. UPPBJ Balaikota;
 - b. UPPBJ Kota Jakarta Pusat;
 - c. UPPBJ Kota Jakarta Barat;
 - d. UPPBJ Kota Jakarta Selatan;
 - e. UPPBJ Kota Jakarta Timur; dan
 - f. UPPBJ Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

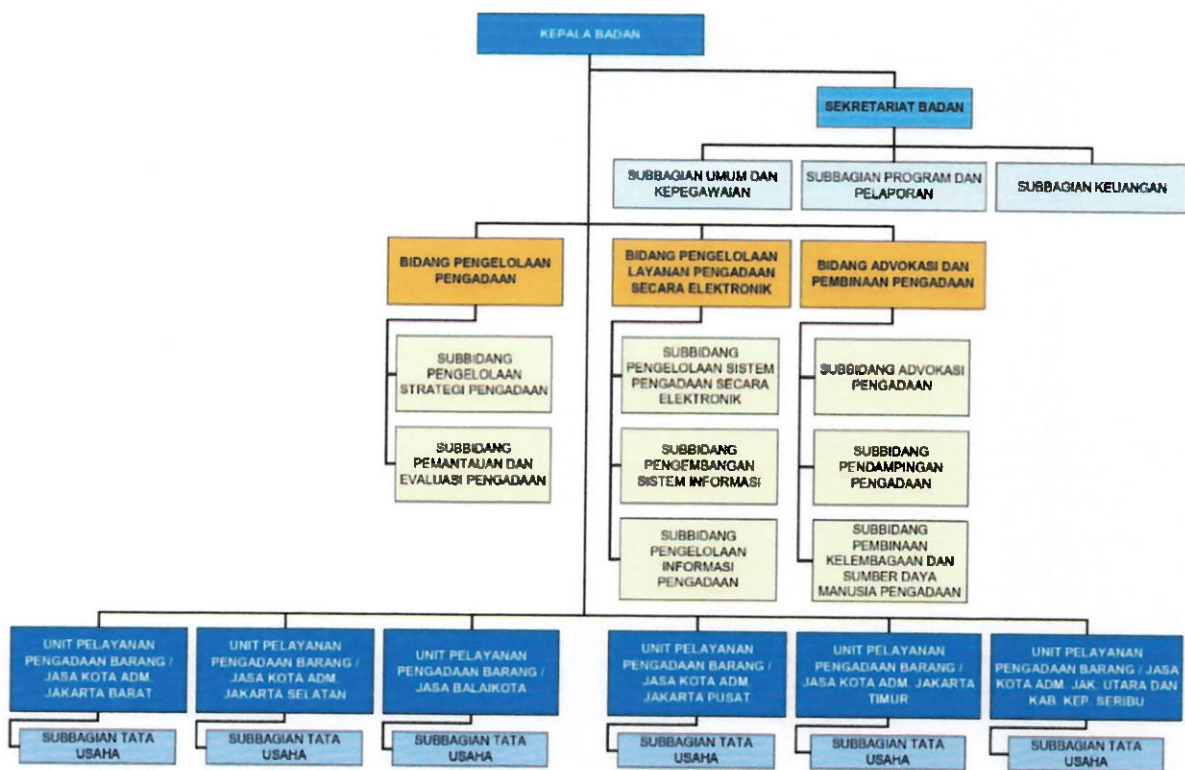


Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPBJ

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

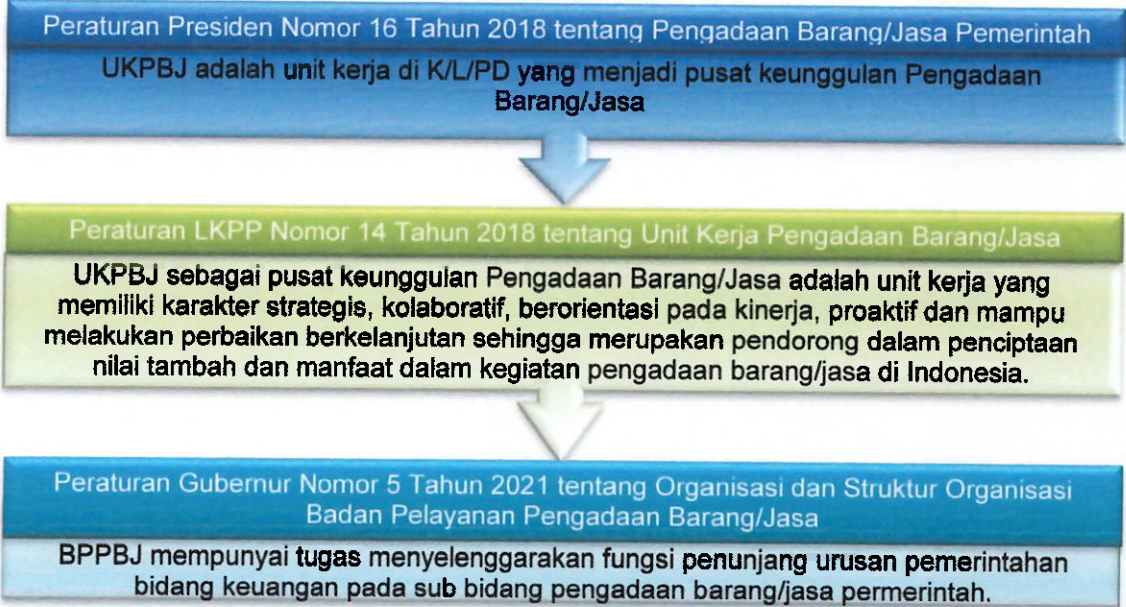


Diagram 1.2 Aspek Strategis Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa

Peningkatan layanan PBJ guna mendukung perbaikan pelayanan publik (melalui perubahan pola pikir dari *process centric* ke *cutomer centric organization*);

1. Perbaikan infrastruktur fisik layanan PBJ;
2. Pengelolaan risiko yang efektif;
3. Pengelolaan stakeholder yang mendukung obyektif PBJ;
4. Penyusunan dan implementasi standarisasi prosedur PBJ yang terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Percepatan implementasi Jabfung dan sistem remunerasi;
6. Pemenuhan kebutuhan SDM di BPPBJ/UPPBJ;
7. Penerapan pengadaan berbasis kinerja;
8. Perbaikan dan pengembangan sistem kepegawaian;
9. Penerapan strategi pengadaan yang efektif dan efisien;
10. Pengembangan sistem PBJ online untuk mempermudah pelaksanaan proses, pelaporan, dan monitoring.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa per tanggal 1 Desember 2021 adalah 159 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:

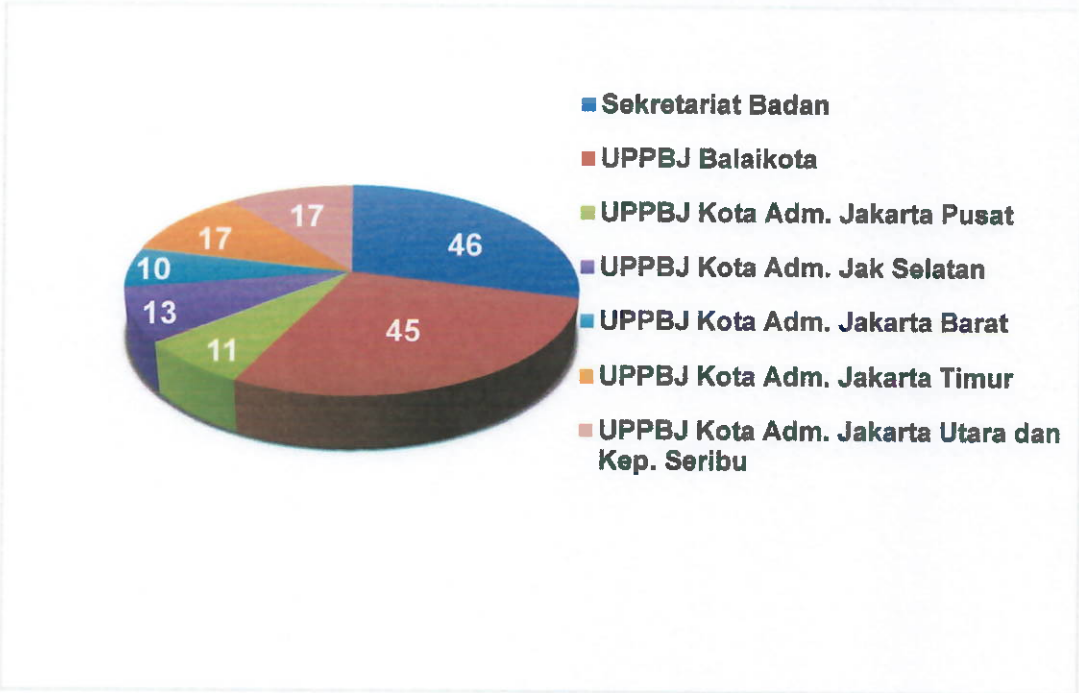


Diagram 1.3 Jumlah Pegawai BPPBJ

Berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, berikut sebaran pegawai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

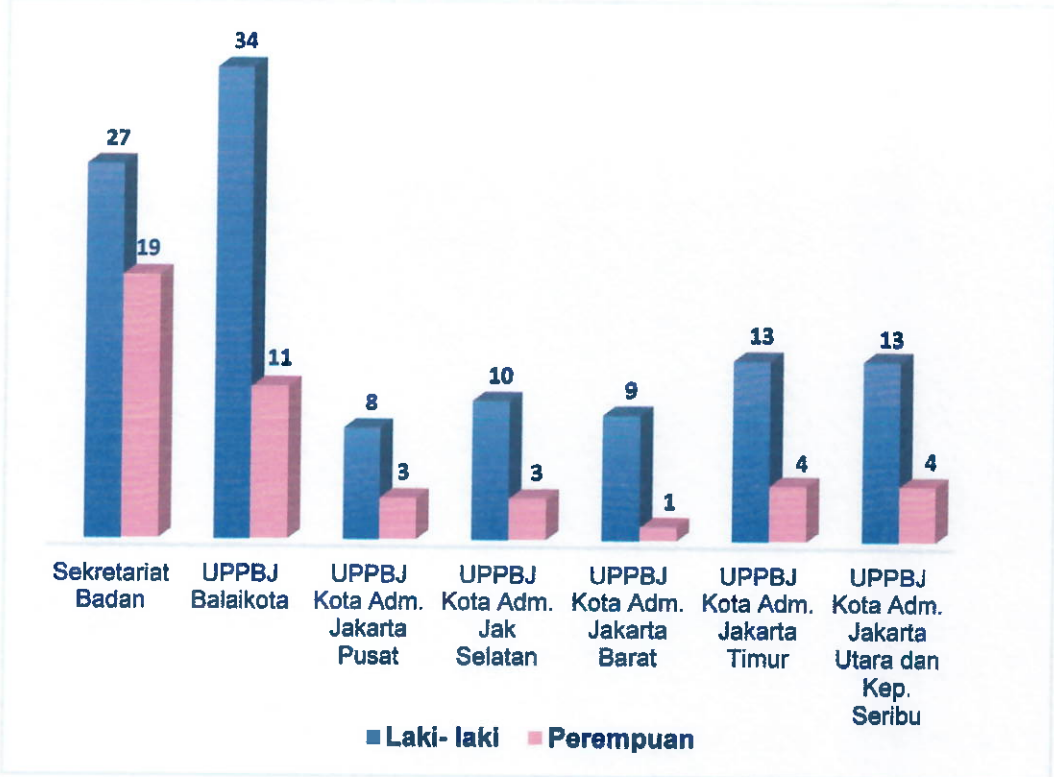


Diagram 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai BPPBJ adalah sebagai berikut:

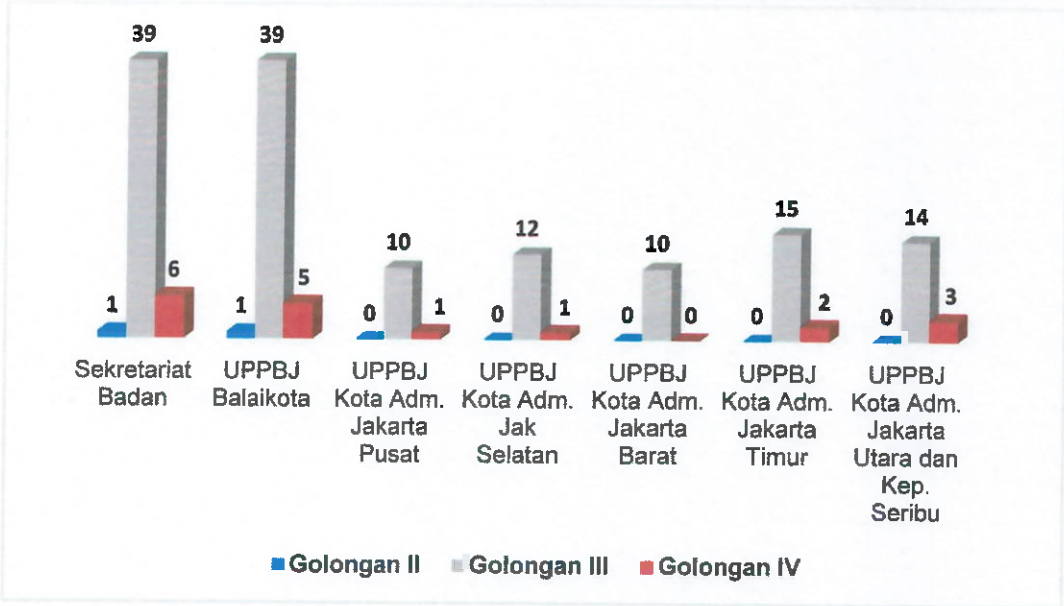


Diagram 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

F. PERMASALAHAN UMUM

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja, diantaranya:

1. Berdasarkan perhitungan terdapat kebutuhan sejumlah 173 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, namun saat ini baru terpenuhi sejumlah 75 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan keterbatasan personil yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang jasa ataupun tingkat pendidikan yang belum memenuhi persyaratan meskipun telah memiliki Sertifikat Pengadaan Parang Jasa.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 21 orang Pengelola PBJ Muda yang sedang dalam proses penilaian angka kredit dan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang jabatan Madya, namun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan jenjang jabatan Madya hanya diperoleh sebanyak 7 formasi. Oleh karena itu, dalam rangka mempertimbangkan jenjang karir Pengelola PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada LKPP selaku Instansi Pembina JF PPBJ, agar dapat merekomendasikan usulan kebutuhan dengan tambahan jumlah formasi pada jenjang jabatan Madya, namun LKPP hanya merekomendasikan formasi PBJ Madya sejumlah 18, sebagai berikut.

Tabel 1.1 Usulan Kebutuhan Pengelola PBJ

No.	Jenjang Jabatan	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Formasi Rekomendasi LKPP
1	Pengelola PBJ Pertama	101	96
2	Pengelola PBJ Muda	65	59
3	Pengelola PBJ Madya	7	18
Total		173	173

(Sumber data : Surat LKPP Nomor 150/D.3/01/2022)

G. SARANA DAN PRASARANA

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di Gedung Balaikota Blok H, lantai 19 dan 20. Sedangkan Unit Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk UPPBJ Balaikota menempati Gedung Balaikota Blok H, lantai 19 dan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu masih menjadi satu dengan UPPBJ Kota Administrasi Jakarta Utara menempati gedung di Kantor Walikota Jakarta Utara.

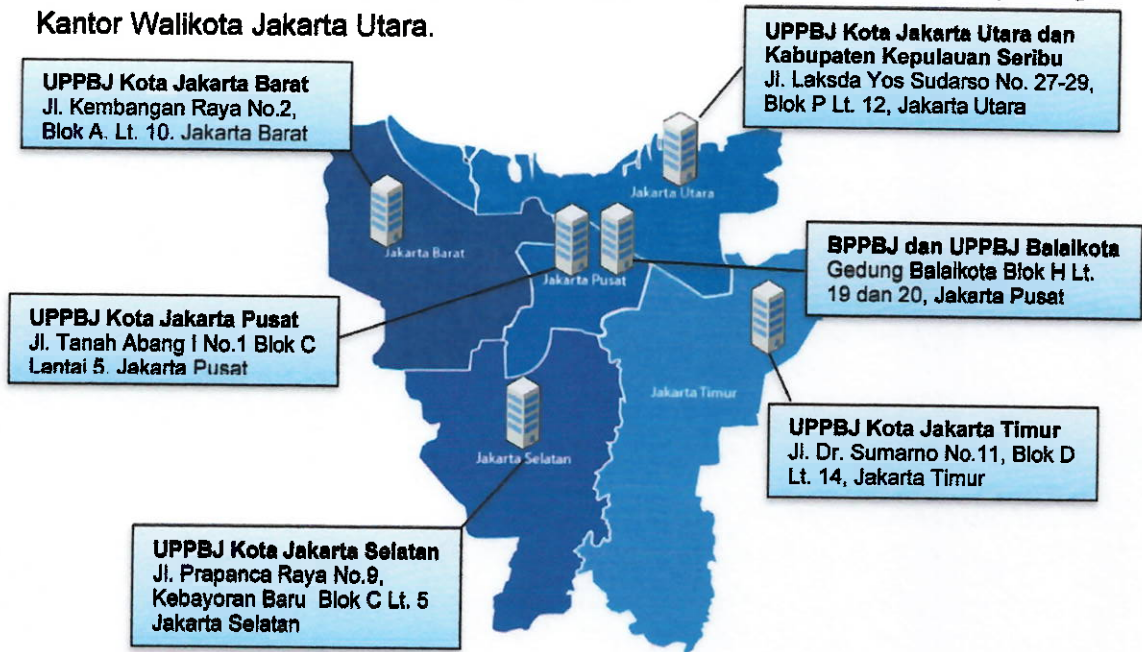


Diagram 1.6 Alamat kantor BPPBJ dan UPPBJ

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan rencana kinerja mempunyai kegiatan yang prioritas yang berfungsi mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-programnya, rencana strategik yang merupakan prioritas tahun 2021 diarahkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengakomodir penerapan strategi pengadaan yang efektif dan efisien;
2. Pengelolaan risiko dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pengelolaan kinerja pengadaan di seluruh siklus yang berorientasi kepada *value for money*;
4. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi kepada para pelaku pengadaan;
5. Pengembangan sistem informasi PBJ online untuk pengelolaan proses dan dokumentasi;
6. Pengelolaan hubungan ke para stakeholder melalui komunikasi yang proaktif;
7. Pengembangan berkelanjutan BPPBJ sebagai pusat unggulan (CoE).

Untuk melakukan perencanaan strategis adalah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022, yang merupakan dokumen kerja untuk lima tahunan, rencana strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap berwawasan pada jangkauan jangka panjang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan rencana strategis ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam rangka mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, dengan pokok-pokok kebijakan meliputi :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen resiko
2. Pendampingan Pokja Untuk Manajemen Resiko
3. Supervisi dan Monev UPPBJ
4. Inventarisasi penyelesaian kasus hukum

- 5. Jasa Konsultansi Penyusunan SOP
- 6. Pelatihan strategi pengadaan
- 7. Pelatihan Dasar Jabfung PBJ
- 8. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan
- 9. Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
- 10. Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
- 11. Peningkatan Kompetensi Pokja Terhadap Peraturan LKPP No.9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PBJ
- 12. Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu
- 13. Bimbingan Teknis
- 14. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
- 15. Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Prima
- 16. Bimbingan dan Konseling Pengadaan Barang/Jasa
- 17. Publikasi informasi pelaksanaan kegiatan PBJ melalui media massa

B. VISI DAN MISI BPPBJ

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, maka Visi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta adalah:



Diagram 2.1 Visi dan Misi BPPBJ

Rumusan visi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu **“Organisasi Pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel”** dan **“berorientasi pada pelayanan publik”**. Pengertian dari dua kata kunci tersebut adalah sebagai berikut: **Organisasi Pengadaan yang bersih, transparan, akuntabel** ditandai dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memandirikan, sinergis dan tepat sasaran, organisasi pengadaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan terstandarisasi, penempatan aparatur yang berbasis kompetensi dan kebutuhan, serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Berorientasi pada pelayanan publik ditandai dengan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang prima, penyediaan sistem dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan profesional, pengelolaan aset dan barang daerah yang rapi, penyediaan mekanisme pengadaan yang baik serta penyediaan kebijakan dan peraturan pengadaan barang/jasa yang harmonis, aspiratif, dan berkeadilan.

✦ **Misi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta**

Mengintegrasikan rantai proses pengadaan barang/jasa:

1. Meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa berorientasi pada *value for money*
2. Mengembangkan kapabilitas sebagai pusat unggulan pengadaan barang/ jasa (*Center of Excellence*) secara berkelanjutan
3. Mengembangkan profesionalisme personil PBJ melalui SDM yang terintegrasi berbasis kompetensi
4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel

C. PENETAPAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja tahun 2021 digunakan sebagai target kinerja tahunan dalam rangka mencapai kinerja tahunan dan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2017-2022.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis				
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	(3) WTP
2	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	4
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (43)	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%
11	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	100%
Sasaran khusus				
12	Terwujudnya layanan Barang dan Jasa melalui Ekatalog yang berkualitas bagi pemangku kepentingan (stakeholder)	1	Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	92
17	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai rencana pengadaan	1	Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan	100%
Sasaran Operasional				
18	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

(Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja BPPBJ Tahun 2021)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan target kinerja pada Tahun 2021 tersebut telah menyiapkan APBD Tahun 2021 sebesar Rp 77.749.556.404 (setelah dilakukan rasionalisasi APBD refocusing pada Tahun 2021). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program terkait indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Program BPPBJ Tahun 2021

No	Program	Pagu
1	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	3.062.380.928
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.687.175.476
TOTAL		77.749.556.404

(Sumber data : <https://apbd.jakarta.go.id>)

D.TUJUAN YANG AKAN DICAPAI OLEH BPPBJ

Tujuan yang ingin dicapai atas Visi dan Misi diatas adalah:

1. Merencanakan strategi pengadaan yang efektif dan efisien;
2. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur PBJ yang terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Menerapkan pengelolaan risiko yang efektif;
4. Meningkatnya efisiensi dan realisasi penggunaan anggaran;
5. Meningkatnya penyelesaian pengadaan barang/jasa secara tepat waktu;
6. Meningkatnya kualitas proses dan hasil dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Meningkatnya kepuasan pelanggan atas layanan BPPBJ;
8. Melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi secara regular;
9. Meningkatkan kualitas hubungan yang efektif dengan para pelanggan dan stakeholder;

10. Mengembangkan sistem tata kelola dokumen PBJ;
11. Memberikan sesi *sharing* ataupun *sistering* ke UKPBJ non DKI;
12. Mengimplementasikan Jabfung PBJ;
13. Mengembangkan kualitas SDM berbasis kompetensi untuk seluruh fungsi pengadaan;
14. Mengembangkan sistem kepegawaian untuk mendukung fungsi BPPBJ/ UPPBJ;
15. Meningkatkan perolehan skor EKPPD;
16. Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran;
17. Meningkatkan tata kelola atas sarana dan prasarana yang dimiliki;
18. Mengembangkan sistem PBJ online terintegrasi;
19. Memperbaharui dokumen renstra sesuai dinamika organisasi.

E. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2021 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Tersedianya usulan strategi pengadaan sesuai paket;
2. Tersedianya prosedur PBJ yang mendukung standarisasi dan integrasi proses utama PBJ serta proses pendukungnya;
3. Terlaksananya proses sesuai dengan prosedur;
4. Terkelolanya risiko utama di setiap paket pengadaan strategis;
5. Terdokumentasikannya pustaka risiko PBJ;
6. Tersedianya bantuan hukum bagi pelaku pengadaan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko;
7. Tercapainya peningkatan kinerja terkait dengan anggaran;
8. Tercapainya percepatan waktu proses pengadaan;
9. Tercapainya peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal;

10. Tersedianya informasi status kematangan organisasi dan rencana perbaikan BPPBJ;
11. Terlaksananya pengelolaan hubungan dengan para pelanggan dan stakeholder sesuai rencana;
12. Terkelolanya seluruh dokumen terkait PBJ;
13. Terlaksananya kegiatan sharing ataupun sistering;
14. Tercukupinya kebutuhan Jabfung PBJ di semua tingkatan;
15. Tersedianya rencana pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk seluruh fungsi pengadaan;
16. Tersedianya system informasi kepegawaian dengan fitur *employee self service*;
17. Tercapainya peningkatan skor EKPPD;
18. Tercapainya peningkatan kinerja terkait dengan anggaran;
19. Tersedianya data sarana dan prasarana;
20. Terpenuhinya kebutuhan atas sarana dan prasarana;
21. Tersedianya system informasi PBJ online (perencanaan sampai dengan pembayaran);
22. Tersusunnya draft Renstra yang disesuaikan dengan arahan pimpinan dan perubahan regulasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA BPPBJ

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepda masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja adalah memberikan informasi kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Badan Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Tahun 2021 terdapat sasaran strategis yang diampu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa beserta indikator sasaran. Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja BPPBJ Tahun 2021

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Strategis						
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	100%
2	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	4	4	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	95.29%	100%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan	100%	100%	100%

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)			
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	100%	100%
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan,	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (43)	100%	100%	100%

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	akuntabel serta berbasis teknologi informasi	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%
11	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	100%	100%	100%
Sasaran Khusus						
12	Terwujudnya layanan Barang dan Jasa melalui Ekatalog yang berkualitas bagi pemangku kepentingan (stakeholder)	1	Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	A (89,81)	100%
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	92	95,46	104%

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai rencana pengadaan	1	Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan	100%	100%	100%
Sasaran Operasional						
18	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

(Sumber data : pegawai.jakarta.go.id)

Berdasarkan data di atas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja utama, terdiri dari:

1. Capaian Opini laporan Keuangan

Sesuai ketentuan, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan sejak laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan ke BPK. Sehingga, dalam laporan kinerja ini, capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2020. Opini laporan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 secara konsisten memperoleh predikat WTP. Upaya yang dilakukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung peroleh predikat WTP diantaranya secara konsisten menggunakan Sistem Informasi Smart Budgeting dalam melakukan perencanaan dan penganggaran, menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian pengelolaan aset secara konsisten menggunakan Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset dan Sistem (SIERA). Selain itu dilakukan reviu atas LKPD Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa oleh Inspektorat dan BPK RI perwakilan

DKI Jakarta. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga melakukan monitoring serta mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa memberikan dukungan penuh dengan menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan Sasaran Operasional ketiga yakni terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan dengan capaian 100%. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut. Predikat WTP dicapai berkat dukungan seluruh pegawai dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan, dengan Subbagian Program dan Pelaporan yang bertugas mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK.

2. Capaian Indeks Kepuasan Layanan PBJ

Pelaksanaan survei kepuasan layanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa bagi penyedia/ OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah 159 responden yang berasal dari masing-masing wilayah yang dihimpun oleh masing-masing UPPBJ. Indikator survei yang digunakan yaitu :

- a. Prosedur, persyaratan dan keramahan pelayanan;
- b. Kualitas dan keahlian teknis Pokja pemilihan;
- c. Hasil dan proses pelayanan pengadaan;
- d. Infrastruktur pelaksanaan pelayanan.

Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pencapaian dari program/ kegiatan yang terkait, di antaranya:

1. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa dengan kegiatan diantaranya:
 - a. Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa dengan total anggaran Rp 1.231.588.512 dan terealisasi Rp 1.229.184.000 (100%). Sesuai dengan permasalahan umum yang dijabarkan pada BAB I, Per tanggal 31 Desember 2021 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa masih mengalami kekurangan personil PBJ sehingga untuk memastikan pelayanan pengadaan

- barang dan jasa tetap optimal diperlukan tenaga pendukung Pokja. Jumlah tenaga pendukung pokja pada tahun 2021 berjumlah 12 orang;
- b. Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa dengan total anggaran Rp 745.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 648.000.000 (87%). Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berusaha memastikan sistem pengadaan barang/jasa dapat memberikan pelayanan yang melebihi kebutuhan bahkan harapan dari *stakeholder* baik internal dan eksternal, sehingga *stakeholder* baik internal dan eksternal merasa puas terhadap layanan pengadaan barang dan jasa. Salah satu kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut adalah pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan. Pada tahun 2021 pengembangan sistem difokuskan pada pengembangan sistem e-lang yang dapat mengakomodir proses perencanaan, persiapan pemilihan dan manajemen kontrak;
 - c. Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan total anggaran Rp 686.792.416 dan terealisasi Rp 418.500.000 (61%). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2021 realisasi anggaran dari kegiatan ini hanya terlaksana pada komponen
 - d. Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa dengan total anggaran Rp 14.000.000 dan terealisasi Rp 14.000.000 (100%). Kegiatan ini bertujuan agar Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (SDM PBJ) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menginventarisasi permasalahan pengadaan barang dan jasa yang ada di lapangan dan menemukan solusinya bersama-sama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa dengan total anggaran Rp 384.800.000 dan terealisasi Rp 363.800.000 (95%). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan dengan kompleksitas yang tinggi seperti tenaga ahli/ narasumber di bidang konstruksi sehingga didapatkan hasil pengadaan barang dan jasa

yang *value for money* dan memberikan kepuasan terhadap *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini juga menyediakan tenaga ahli di bidang hukum untuk membantu dalam pembuatan kontrak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengukur 3 komponen, yakni penyerapan anggaran, efisiensi dan pencapaian output. Pada tahun 2021 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mendapat nilai 95,46% dari target 91% yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pencapaian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman
- g. Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- h. Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi
- i. Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
- j. Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus
- k. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Pencapaian penyerapan anggaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 97,69%. Secara umum, penyerapan anggaran sudah optimal, namun pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menjadi kontributor terbesar sehingga capaian anggaran pada program tersebut belum 100%. Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran tidak terserap sebesar Rp 1.221.127.995 atau 1,6% dari anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan saat perencanaan anggaran diasumsikan terdapat mutasi PBJ dari OPD lain untuk memenuhi kebutuhan PBJ, namun hal tersebut belum terealisasi.

4. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD 20)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menjadi penanggung jawab KSD 20 pada rencana aksi:

a. Penyediaan Ruang Usaha

Rencana aksi penyediaan ruang usaha dengan target capaian Penyampaian Peraturan Gubernur tentang e-order ke Gubernur pada triwulan I, telah berhasil terealisasi dengan penyampaian draft Pergub tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Marketplace ke Gubernur pada triwulan I. Penyusunan draft Peraturan Gubernur tersebut dilaksanakan dengan mengundang dan mengakomodir masukan dari *stakeholder* internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Biro Hukum, Biro KDH dan Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta juga mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia untuk memastikan Peraturan Gubernur tersebut sesuai dengan Peraturan LKPP RI.

b. Pemasaran Produk

Rencana aksi pemasaran produk dengan target capaian Laporan Pembelian Produk Jakpreneur melalui e-order di triwulan II, III dan IV telah berhasil dicapai. Ruang lingkup laporan tersebut meliputi data transaksi seluruh SKP/UKPD/BUMD, data UMKM dan data produk yang terdaftar di sistem E-Order pada triwulan II, III dan IV. Berikut rekapitulasi data tersebut per tanggal 14 Desember 2021:

1. Nilai transaksi tahun 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dari 279 SKPD/UKPD/BUMD adalah 39,877 milyar;
2. Jumlah UMKM yang terdaftar sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 adalah 2097 UMKM peserta program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan 32 UMKM Non-PKT yang terdaftar dari 32 SKPD/UKPD/BUMD Pendamping;
3. Jumlah produk yang terdaftar sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 adalah 6.685 produk.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

5. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD 22)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Pelaksanaan Tender JSS Zona 1 Paket 5 dan 6. Capaian pada renaksi tersebut tetap 100% meskipun tender belum terlaksana disebabkan BPPBJ belum dapat berproses tender sebelum adanya dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Dinas SDA atas dasar permohonan tender oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air melalui aplikasi e-lang BPPBJ untuk pekerjaan JSS Zona 1 paket 5 dan 6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

6. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD 23)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Tayangnya item-item sumur resapan, PAH pada sistem e-katalog. Capaian target tersebut didukung kerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air dan juga LKPP RI. Dinas Sumber Daya Air telah menyampaikan Surat Keputusan Tim Teknis Dinas Sumber Daya Air dan kelengkapan/ analisa teknis pendukung atas usulan item-item sumur resapan pada Januari 2021. Penandatanganan Kontrak antara BPPBJ dengan Penyedia Katalog dilakukan tanggal 24 Juni 2021. Setelah berkoordinasi dengan LKPP terkait penanyangan katalog sumur resapan, katalog sumur resapan telah tayang pada website katalog lokal – LKPP sesuai dengan target yang ditentukan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

7. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD 29)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Penayangan Harga Jasa Rp/Km untuk Bus Kecil (AC). Capaian target tersebut didukung kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen berupa KAK dan Spesifikasi Teknis Usulan Katalog Bus Kecil AC pada triwulan I. Namun target pada triwulan II yakni Pemilihan penyedia, review hasil pemilihan, tandatangan kontrak mundur dari jadwal karena terkendala proses negosiasi antara Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta dan operator yang belum mencapai kesepakatan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

8. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD 73)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa menjadi penanggung jawab KSD 73 pada rencana aksi:

a. Tayangnya e-Katalog lokal berikut kelengkapannya untuk jenis komoditas baru dan/atau akan turun tayang

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni Terlaksananya hasil pemilihan penyedia katalog tiang lampu PJU (April 2021) dan Katalog Tiang lampu PJU sudah tayang sesuai target, yaitu bulan Juni 2021. BPPBJ juga telah melakukan addendum kontrak untuk perpanjangan kontrak katalog katagori Hotmix selama 6 bulan yaitu mulai tanggal 22 Februari 2021 s.d. berakhir tanggal 21 Agustus 2021. Untuk proses pemilihan penyedia e-Katalog lokal berikut kelengkapannya untuk kategori hotmix.

b. Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan. Pada tanggal 26 Februari 2021 pengumuman jasa konsultan pengawas telah tayang di LPSE DKI Jakarta dan BPPBJ telah menetapkan pemenang jasa konsultansi pengawasan pada 14 April 2021.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

9. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi :

- a. Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah menyusun dokumen LKIP BPPBJ Tahun 2020 dan mengunggah laporan tersebut pada aplikasi esr.menpan.go.id sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- b. Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah menyusun laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 dan Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022 sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

- c. Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah triwulan sebelumnya, Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-2022 dan Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional triwulan sebelumnya sesuai jadwal dan target yang ditentukan.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

10. Capaian Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021. Capaian target TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021 triwulan II terdapat sejumlah 17 rekomendasi dengan target jumlah penyelesaian 13,60 dan terealisasi sejumlah 16 rekomendasi sesuai dengan berita acara Penyelesaian TLHP APIP yang terbit sejak tahun 2019 yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2021. Pada triwulan IV terdapat sejumlah 12 rekomendasi dengan target penyelesaian sejumlah 10,20 dan terealisasi sejumlah 10,50 rekomendasi sesuai dengan berita acara Penyelesaian TLHP APIP yang terbit sejak tahun 2019 yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2021. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

11. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (KSD 43)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Dukungan pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Transformasi Digital. Capaian target Terlaksananya lelang pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Transformasi Digital I, II dan III, diantaranya :

- a. Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Analitik Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;
- b. Pengadaan Server Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;
- c. Pengadaan Perangkat Lunak Database Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;
- d. Pengadaan Network Attached Storage Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;
- e. Pengadaan Perangkat Jaringan Transformasi Digital UP Jakarta Smart City;

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

12. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD 63)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Capaian target Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital dan Tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta tercapai sesuai target dan waktu yang telah ditentukan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

13. Capaian Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (KSD 71)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjadi pengampu pada rencana aksi Penayangan Harga Jasa Rp/Km untuk Bus Listrik. Target capaian pada triwulan II, yakni Pemilihan penyedia, review hasil pemilihan, tandatangan kontrak telah tercapai dengan terlaksananya pemilihan penyedia, review hasil pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 29 Juni 2021. Target capaian pada triwulan III yakni Laporan Koordinasi Penayangan Katalog telah tercapai dengan tayangnya Harga Jasa Rp/Km untuk Bus Listrik pada katalog lokal-LKPP. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

14. Capaian Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku.

Pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku terlaksana berkat dukungan Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal yang telah menyelesaikan proses pemilihan katalog elektronik daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SOP yang berlaku. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

15. Capaian Persentase Pemanfaatan E-Order

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order terlaksana berkat komitmen Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil binaan untuk memasarkan produknya. Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Rincian Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman khususnya snack rapat yang seluruhnya dipesan melalui E-order, sesuai dengan Instruksi Gubernur No.29 Tahun 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro Kecil (Melalui Sistem E-order). Pagu yang dialokasikan sebesar Rp 36.000.000 terealisasi sebesar Rp 35.926.000 atau 99,8%.

16. Capaian Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengangkat tema "Peluang Usaha Mikro Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan E-Order BPPBJ" dilatarbelakangi komitmen Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil binaan untuk memasarkan produknya. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara berkala mempublikasikan E-Order melalui berbagai kanal media seperti facebook, instagram dan juga website BPPBJ agar masyarakat mengetahui komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung UMK binaan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

17. Capaian Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan predikat A (89,81) menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang baik. Komponen yang menjadi penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

18. Capaian Nilai PMPRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perbaikan dalam setiap komponen pengukuran yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, membuat Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi, membuat Surat Keputusan Kepala Badan tentang Standar Waktu Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, survei kepuasan masyarakat (penyedia dan OPD) secara berkala, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

19. Capaian Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan

Pencapaian target indikator kinerja Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan dapat tercapai berkat dukungan Pokja yang menyelesaikan pemilihan penyedia barang dan jasa yang didanai melalui Pinjaman PEN (sesuai dengan perencanaan pengadaan). Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

20. Capaian Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pencapaian target indikator kinerja persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dapat tercapai berkat dukungan seluruh pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang selalu konsisten melakukan tindak lanjut setiap arahan Gubernur, baik melalui rapat pimpinan, e-office, arahan melalui media elektronik dan bentuk arahan lainnya. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

21. Capaian Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Pencapaian target indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dapat tercapai berkat kerjasama seluruh pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam memonitor setiap pengaduan masyarakat pada sistem CRM dan secara sigap menindaklanjuti setiap aduan masyarakat untuk kemudian dilaporkan penyelesaian aduan masyarakat dengan menguploadnya ke sistem CRM Kepala Badan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

22. Capaian Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berkomitmen untuk selalu menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK. Selain itu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring serta mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki program dan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

2. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Indikator kinerja utama Indeks Kepuasan pertama kali diperjanjikan pada tahun 2021 menggantikan indikator kinerja utama sebelumnya yaitu Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu yang berubah menjadi indikator kinerja pada level program, sehingga indikator kinerja utama indeks kepuasan layanan PBJ belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data yang dapat dibandingkan adalah indikator sasaran sesuai RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yakni indikator kinerja utama Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu. Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan tren realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja				Realisasi/Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Terlaksananya prinsip <i>Value for Money</i> dalam proses pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	85	87,5	90	92,5	95	97	98	100

(Sumber data: SK Penetapan IKU BPPBJ Tahun 2018-2022 dan e-SAKIP)

Untuk penyelesaian Pengadaan Barang/jasa Tepat waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui surat keputusan Kepala Badan pelayanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018, pada dasarnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa telah melampaui dari target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat

sebagaimana tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II Badan Pelayanan Penagadaan Barang/Jasa:

- 1. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 95%
- 2. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 87,5% dan terealisasi 97%
- 3. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 98%
- 4. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 92,5% dan terealisasi 100%

Pada tahun anggaran 2018 - 2022 BPPBJ telah menyelesaikan proses tender Barang dan Jasa untuk SKPD/ UKPD masing-masing sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Paket Tender Selesai Periode Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Paket Tender	Nilai HPS (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)
2018	1.486	6.562.600.326.533	6.065.455.716.017
2019	2.138	13.629.246.943.766	12.591.447.490.331
2020	919	1.755.274.325.758	1.568.802.940.841
2021	733	5.014.056.239.796	4.600.709.907.182

(Sumber data : monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa BPPBJ)

Berikut rekapitulasi data tender di Badan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa per tanggal 31 Desember 2021:

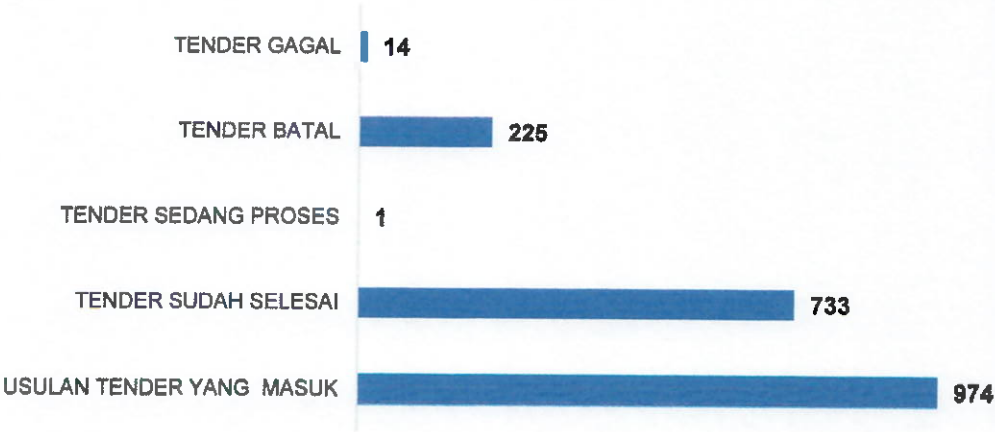


Diagram 3.1 Perbandingan Realisasi Tender Terhadap Usulan Berdasarkan Jumlah Paket (Sumber data : e-Monev Pengadaan Barang/Jasa, diolah)

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana terlampir, berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Dalam Mencapai Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1.	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	100	87,30	12,7
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	97,69	2,31

(Sumber data : e-SAKIP dan e- Monev, diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa terdapat efisiensi sebesar 12,7%. Salah satu faktor yang mendukung adalah tidak terealisasinya belanja modal PC dan printer sebesar Rp 266.792.416 atau 8,7% pada Rincian Sub Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, namun demikian output dari Rincian Sub Kegiatan tetap tercapai menggunakan PC dan printer yang ada. Pencapaian sasaran kedua yakni Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat efisiensi sebesar 2,31%. Salah satu faktor yang mendukung adalah tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 1.221.127.995 atau 1,6% pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan saat perencanaan anggaran diasumsikan terdapat mutasi Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari OPD lain untuk memenuhi kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut belum terealisasi. Sedangkan untuk sasaran strategis lain termasuk KSD, sasaran khusus dan sasaran operasional tidak menggunakan anggaran sehingga tidak terdapat efisiensi.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL ATAU PROVINSI LAIN

Pada indikator kinerja utama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2021, yaitu Indeks Kepuasan Layanan PBJ belum tersedia data Indeks Kepuasan Layanan PBJ dari UKPBJ Provinsi lainnya, sehingga indikator kinerja utama tersebut belum bisa dibandingkan dengan UKPBJ Provinsi lain.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagai informasi pelaksanaan APBD 2021 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, pada periode tahun anggaran 2021 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 77.749.556.404 (setelah anggaran difocusing).

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran BPPBJ Tahun Anggaran 2021

Kategori Belanja	Alokasi (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	Penyerapan (%)
Belanja Operasi	77.313.502.368	75.635.735.696	97,83%
Belanja Pegawai	69.472.954.000	68.251.826.005	98,24%
Belanja Barang dan Jasa	7.840.548.368	7.383.909.691	94,18%
Belanja Modal	436.054.036	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	436.054.036	0	0,00%
Pagu Unit Kerja	77.749.556.404	75.635.735.696	97,28%

(Sumber: <https://monev.bapedadki.net/>, diolah)

Akuntabilitas keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dimana total penyerapan belanja operasi sebesar Rp 75.635.735.696 dari target alokasi sebesar Rp 77.313.502.368 sehingga menghasilkan rata-rata capaian penyerapan anggaran belanja operasi dan belanja modal sebesar 97,83%. Tidak ada penyerapan terhadap belanja modal dikarenakan SPD yang terbit diakhir Desember sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran program/kegiatan yang menunjang capaian perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021				Program	Pagu	Realisasi	Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %				
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Nilai	3 (WTP)	3 (WTP)	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	Nilai	4	4	100	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.062.380.928	2.673.484.000	87%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	95,29	105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.687.175.476	72.962.251.696	98%

(Sumber data : e-SAKIP dan <https://monev.bapedadki.net/>, diolah)

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat dilihat sasaran strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif tidak memiliki program, kegiatan dan alokasi anggaran, namun berhasil mencapai target kinerja predikat WTP pada laporan keuangan daerah. Sedangkan proporsi pagu anggaran Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 4% dari total anggaran belanja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Namun hal ini dapat dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan PBJ. Pada sasaran strategis yang terakhir yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki serapan anggaran yang tinggi sebesar 98%. Untuk melihat lebih rinci serapan anggaran, berikut rincian serapan anggaran masing-masing sub kegiatan.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Per Sub Kegiatan Tahun 2021

Program	Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa	1.231.588.512	1.229.184.000	100%	100%
	Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa	745.200.000	648.000.000	100%	87%
	Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	686.792.416	418.500.000	100%	61%

Program	Sub Kegiatan	Tahun 2021			
		Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa	14.000.000	14.000.000	100%	100%
	Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa	384.800.000	363.800.000	100%	95%
	Pengelola arsip dokumen pengadaan barang/jasa	418.642.308	418.572.000	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	189.261.620	0	100%	0%
	Penyediaan alat tulis kantor	1.624.161.660	1.367.920.000	100%	84%
	Penyediaan sewa mesin fotokopi	224.769.600	207.820.800	100%	92%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	148.156.250	141.405.000	100%	95%
	Penyediaan makanan dan minuman	64.104.120	61.153.100	100%	95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.472.954.000	68.251.826.005	100%	98%
	Penyediaan administrasi keuangan	7.510.000	7.410.000	100%	99%
	Penyediaan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan	2.456.545.158	2.410.812.141	100%	98%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	88.452.760	88.426.250	100%	100%
	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	12.618.000	6.906.400	100%	55%
	TOTAL	75.635.735.696	100%	97,28%	

(Sumber data : Olahan data dari <https://monev2021.bapedadki.net>)

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, berikut uraian pencapaian anggaran per Sub Kegiatan pada Program Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

1. Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa dengan total anggaran Rp 1.231.588.512 dan terealisasi Rp 1.229.184.000 (100%). Seluruh anggaran berhasil dioptimalkan untuk penyediaan tenaga

- pendukung Pokja sehingga pelayanan pengadaan barang dan jasa tetap optimal. Jumlah tenaga pendukung pokja pada tahun 2021 berjumlah 12 orang;
2. Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa dengan total anggaran Rp 745.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 648.000.000 (87%). Kegiatan ini fokus pada pengembangan sistem e-lang yang dapat mengakomodir proses perencanaan, persiapan pemilihan dan manajemen kontrak;
 3. Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan total anggaran Rp 686.792.416 dan terealisasi Rp 418.500.000 (61%). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Serapan anggaran pada kegiatan ini belum optimal disebabkan belanja modal komputer dan printer belum terealisasi karena Surat Penyediaan Dana (SPD) yang terbit pada akhir bulan Desember 2021 sehingga sulit untuk melaksanakan pengadaan barang modal tersebut. Namun, hal tersebut tidak mengganggu operasional Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa dengan total anggaran Rp 14.000.000 dan terealisasi Rp 14.000.000 (100%). Kegiatan ini bertujuan agar Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (SDM PBJ) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menginventarisasi permasalahan pengadaan barang dan jasa yang ada di lapangan dan menemukan solusinya bersama-sama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 5. Penyediaan tenaga ahli/nara sumber dalam proses pengadaan barang/jasa dengan total anggaran Rp 384.800.000 dan terealisasi Rp 363.800.000 (95%). Anggaran kegiatan berhasil dioptimalkan untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan dengan kompleksitas yang tinggi seperti tenaga ahli/ narasumber di bidang konstruksi sehingga didapatkan hasil pengadaan barang dan jasa yang *value for money* dan memberikan kepuasan terhadap *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini juga menyediakan tenaga ahli di bidang hukum untuk membantu dalam pembuatan kontrak yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (PC dan Printer) dengan total anggaran Rp 169.261.620 dan tidak terealisasi disebabkan SPD yang terbit diakhir Desember sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Namun demikian indikator indeks kepuasan pelayanan kantor tetap tercapai dengan memanfaatkan PC dan Printer yang ada.

7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran Rp 69.472.954.000 dan terealisasi sebesar Rp 68.251.826.005 atau 98%. Penyerapan anggaran tersebut tidak 100% disebabkan saat perencanaan anggaran diasumsikan terdapat mutasi Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari OPD lain untuk memenuhi kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut belum terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari sisi kelembagaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa merupakan lembaga yang sangat strategis yaitu bahwa BPPBJ selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku penanggungjawab proses pengadaan barang dan jasa bagi SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa selaku SKPD menjalankan Program-program yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dalam tahun anggaran 2021 BPPBJ merencanakan dan melaksanakan program-program yang menunjang kinerja pemerintahan daerah yaitu:

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan dimaksud kami sajikan kegiatan utama yang menunjang kinerja antara lain:

I. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penyediaan Jasa Pendukung Pokja dan Tenaga Asisten Pengelola Barang/Jasa
2. Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa
3. Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
4. Pelaksanaan FGD Permasalahan Barang/Jasa
5. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pengadaan barang/jasa
6. Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber Dalam Proses Pengadaan barang/Jasa
7. Penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
8. Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Pengelola arsip dokumen pengadaan barang/jasa
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan sewa mesin fotokopi
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan jasa administrasi keuangan
10. Penyediaan jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan
11. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
12. Penyediaan BBM KDO/KDO khusus
13. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus

B. SARAN

Dalam rangka optimalisasi peran lembaga penanggung jawab proses Pengadaan Barang/Jasa, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sangat membutuhkan sumberdaya yang memadai, untuk hal tersebut disarankan:

1. Untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka perlu dilakukan mekanisme penganggaran yang efektif, efisien dan tepat waktu, dan untuk laporan keuangan yang akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan, agar selalu mengikutsertakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan wawasan pengelolaan keuangan dan aset (peningkatan kualitas SDM maupun Kuantitas SDM).
3. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan wawasan proses pengadaan barang jasa bagi Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (UPPBJ).
4. Perlu adanya peningkatan jumlah pegawai yang berstatus fungsional pengadaan barang jasa. Mengingat beban kerja yang di embannya sangat berat untuk tahun anggaran 2021 jumlah paket tender sebanyak 733 dengan nilai kontrak Rp. 4.600.709.907.182,-

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 yang dapat kami sajikan, harapan kami laporan tersebut bermanfaat dan mendukung kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BLESSMIYANDA

Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

BLESSMIYANDA
NIP 196910131997031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Blessmiyanda
 NIP : 196910131997031004
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang takis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-SAKIP	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
2	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	Indeks Kepuasan Layanan PBJ	e-SAKIP	Indeks kepuasan pelayanan pbbj berdasarkan pelaksanaan pengadaan barang jasa sistem e-lanj BPPBJ. Dengan kategorisasi mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 . Indeks 4 Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3.5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,603-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5696 atau nilai interval konversi 25,00-64,99	4	4	4	4	4	Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dan pemennah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarasannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun ouput <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persentase

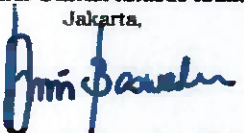
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Persentase penyelesaian capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City nomor (43)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Smart City Nomor(43)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
10	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara nomor (71)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Nomor(71)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase

SASARAN KHUSUS

11	Terwujudnya layanan Barang dan Jasa melalui Ekatalog yang berkualitas bagi pemangku kepentingan (stakeholder)	1	Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai dengan SOP yang berlaku	e-Kinerja	Penyelesaian Ekatalog Tepat Waktu sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order per triwulan dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang Perhitungan: a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021		Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: B1)	N/A	N/A	N/A	A (B1)	A (B1)	Predikat
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai FMPRB	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan: Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut: AA = >90-100, A = >80-90, BB = >70-80, B = >60-70, CC = >50-60, C = >30-50, D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
16	Suksesnya Penyerapan PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai rencana pengadaan	1	Nilai pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan pengadaan	e-Kinerja	Penyelesaian pengadaan barang dan jasa yang didanai melalui Pinjaman PEN (sesuai dengan perencanaan pengadaan)	15%	30%	45%	100%	100%	Persentase

SASARAN OPERASIONAL											
17	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta,


Blessmiyanda
NIP 196910131997031004

**REKAPITULASI SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA
 TRIMULAN IV TAHUN 2021**

PERTANYAAN	1. Prosedur Pelayanan Sudah Baik dan Mudah Dipahami					2. Pelayanan Pelayanan Mudah Dipenuhi					3. Pokja dan Petugas Lolos Sopan dan Ramah dalam melaksanakan pelayanan pengadaan					4. Pokja telah membuat dokumen penawaran yang mudah dipahami					5. pokja memahami proses pengadaan serta submateri pekerjaan pengadaan					6. Pokja telah menyelesaikan proses pengadaan sesuai dengan jadwal					7. Hasil Pengadaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan					8. Kualitas Service dan Prasarana Pengadaan sudah baik (Malpud : Ruang Rapat, Sistem Aplikasi dan Ruang Tunggu)					9. Peningkatan atau Penguatan Layanan Pengadaan sudah berfungsi dengan baik									
	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS	SS	S	CS	TS	STS										
NILAI	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1										
Jumlah Responden per Nilai	81	77	-	-	1	85	71	2	-	1	102	55	1	-	1	84	74	-	-	1	91	88	1	-	1	91	63	4	-	1	87	69	2	-	1	83	68	5	1	1	90	84	4	-	1					
Jumlah Total Responden	186					158					185					159					176					155					151					155					151									
NILAI KONVERSI	88,87%					88,66%					92,39%					98,16%					98,84%					98,67%					98,91%					88,66%					88,44%									
INDEKS KEPUASAN LAYANAN	4,88					4,88					4,88					4,88					4,88					4,88					4,88					4,88					4,88					4,88				
RATA RATA NILAI KEPUASAN LAYANAN	88,41%																																																	
RATA RATA INDEKS KEPUASAN LAYANAN	4,88																																																	
PREDIKAT	SANGAT BAIK																																																	

Pk. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan
 Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta


 Sigit Wijatmoko
 NIP. 197408301993111001